

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	<i>ii</i>
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	<i>iii</i>
PERNYATAAN ORISINALITAS	<i>iv</i>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	<i>v</i>
ABSTRAK	<i>vi</i>
ABSTRACT	<i>vii</i>
RINGKASAN	<i>viii</i>
SUMMARY	<i>xliii</i>
KATA PENGANTAR	<i>xlvi</i>
DAFTAR ISI	<i>xl ix</i>
DAFTAR TABEL	<i>xl ix</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>xl x</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>2</i>
A. Latar Belakang	<i>2</i>
B. Perumusan Masalah	<i>222</i>
C. Tujuan Penelitian.....	<i>222</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>233</i>
E. Kerangka Teori Disertasi	<i>24</i>
1. Teori Keadilan.....	<i>24</i>
2. Teori Pengawasan	<i>31</i>
3. Teori Kedaulatan.....	<i>36</i>
4. Teori Hukum Progresif	<i>47</i>
5. Teori Kelembagaan Negara	<i>57</i>
6. Teori Demokrasi Perwakilan	<i>69</i>
F. Kerangka Konseptual Disertasi.....	<i>72</i>
1. Sistem Perwakilan.....	<i>72</i>
2. Lembaga Perwakilan.....	<i>80</i>
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	<i>98</i>
H. Metode Penelitian.....	<i>98</i>

1. Paradigma Penelitian.....	99
2. Pendekatan Penelitian	100
3. Spesifikasi Penelitian	101
4. Sumber Data, Jenis Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	102
5. Metode Analisa Data.....	104
I. Orisinalitas Penelitian	105
J. Sistematika Penulisan Disertasi	108
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	110
A. Pemerintahan DIY dalam Kerangka Hukum Nasional	110
1. DIY Pra Undang-Undang Keistimewaan.....	111
2. Undang-Undang Keistimewaan	119
B. Tugas dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Lingkup Pemerintahan DIY.....	126
C. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah DIY	128
1. Pengawasan Apriori	130
2. Pengawas Aposteriori	146
D. Kewenangan DIY Sebagai Daerah Otonomi Khusus dalam Lingkup NKRI	147
BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DIY	152
A. Kedudukan dan Fungsi DPRD Berdasarkan Perundangan yang Berlaku	152
B. Perkembangan Perubahan Kedudukan dan Fungsi DPRD	157
C. Analisis Komparasi tentang Kedudukan dan Fungsi DPRD DIY dengan Daerah Lain	187
BAB IV UPAYA OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY	
A. Kewenangan Keistimewaan DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	160
B. Kedudukan dan Fungsi DPRD DIY dalam Kerangka Keistimewaan DIY	161

C. Fakta Empirik Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD DIY dalam Urusan Keistimewaan	163
D. Upaya-Upaya Harmonisasi Fungsi Pengawasan DPRD DIY dalam Urusan Keistimewaan.....	183

BAB V. KONTRUKSI IDEAL PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSAAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012

A. Telaah Hukum Positif Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang Relevan.....	189
B. Analisis Peraturan Perundangan Terkait	192
1. Pengawasan DPRD menurut UU No. 5 Tahun 1974	192
2. Pengawasan DPRD menurut UU No. 22 tahun 1999	206
3. Pengawasan DPRD menurut UU No. 32 Tahun 2004	271
C. Terkait fungsi pengawasan yang dijalankan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terhubung dengan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah.....	304
1. Jalannya pengawasan oleh panitia khusus rancangan keputusan DPRD DIY mengenai Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.....	304
2. Masalah yang dihadapi DPRD DIY ketika melakukan pengawasan keistimewaan	313
3. Langkah awal penguatan fungsi pengawasan DPRD DIY	316
D. Pokok-Pokok Pikiran yang Perlu Dilakukan Rekonstruksi Atas Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	326
E. Implikasi Strategis Terhadap Usulan Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.....	335

BAB VI PENUTUP.....	331
A. Kesimpulan	331
B. Saran.....	332

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PENELITIAN-PENELITIAN YANG PERNAH DILAKUKAN SEBELUMNYA	108
TABEL 2. KOMPARASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, INGGRIS, BELANDA, DAN ARAB SAUDI.....	189
TABEL 3. KOMPOSISI SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS.....	174
TABEL 4. KONSTRUKSI PASAL BERMASALAH TERKAIT FUNGSI DPRD DI DIY....	286
TABEL 5. REKOMENDASI PANSUS BA 15 TAHUN 2018.....	300
TABEL 6. PENINDAKLANJUTAN PEMERINTAH DAERAH DIY TERHADAP REKOMENDASI DARI DPRD DIY.....	311
TABEL 7. KETERLIBATAN DPRD DIY DALAM TAHAPAN TERKAIT APBD DIY DAN DANA ISTIMEWA.....	314
TABEL 8. REKONSTRUKSI NORMA HUKUM UUK.....	330





DAFTAR GAMBAR

BAGAN 1	ALUR PEMIKIRAN MUNCULNYA KEBUTUHAN REKONSTRUKSI FUNGSI DRPD BERDASARKAN PRODUK HUKUM YANG ADA, TERUTAMA UNDANG-UNDANG YANG MENAUNGI OTONOMI DAERAH.....	98
BAGAN 2.	DASAR HUKUM PENGAWASAN DPRD DIY TERKAIT APBD.	167

